

Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan

Erwan Effendi¹, Heny Anggreni Butar-Butar², Yuda Kurniawan³, Rizky Octaviani Aulia Hutabarat⁴, M Nur Badawani Siregar⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: erwanefendi@uinsu.ac.id¹, h.anggrenibtr13@gmail.com²,
yudakurniawan2021@gmail.com³, rizkyauliahtb@gmail.com⁴,
badawani07@gmail.com⁵

Abstrak

Di era digital yang tiada henti saat ini, peran pers menjadi semakin penting dalam menyampaikan berita dan informasi kepada masyarakat. Namun dalam proses penyampaian berita, terkadang terjadi kesalahan yang tidak hanya menyajikan informasi yang menyesatkan namun juga merugikan pihak-pihak tertentu secara moral, finansial, dan reputasi. Penelitian ini mendalami tanggung jawab pers apabila terjadi kesalahan pemberitaan dan hak-hak pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai kasus misinformasi, dampak yang ditimbulkan, dan upaya media dalam memperbaiki kesalahan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pers mempunyai kewajiban moral dan hukum untuk memperbaiki informasi yang salah, memberikan klarifikasi yang akurat, dan dalam beberapa kasus, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Pemahaman ini sangat penting agar pers dapat beroperasi dengan integritas dan kepercayaan yang tinggi di mata masyarakat.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Pers, Kesalahan Pemberitaan, Integritas, Klarifikasi.*

Abstract

In today's relentless digital era, the press's role has become increasingly essential in delivering news and information to society. However, in the process of news delivery, mistakes occasionally occur, presenting not only misleading information but also harming specific parties morally, financially, and reputationally. This research delves into the press's responsibilities when reporting errors arise and the rights of the aggrieved parties due to these errors. Using a qualitative approach, this study examines various misinformation cases, the ensuing impacts, and the media's efforts in rectifying such errors. The findings suggest that the press has both moral and legal obligations to rectify incorrect information, offer accurate clarifications, and in some instances, compensate the aggrieved parties. This understanding is crucial for the press to operate with high integrity and trust in the public's eyes.

Keywords : *Responsibility, Press, Reporting Errors, Clarification, Integrity.*

PENDAHULUAN

Pers memiliki pengertian yang luas. Pengertian pers secara harfiah mengacu pada komunikasi yang dilakukan melalui perantara hasil cetakan. Tapi saat ini, pers telah mengalami pengembangan secara pengertiannya. Pengertian pers memiliki dua artian, arti sempit dan arti luas. Pengertian pers secara luas dan secara sempit ini menyangkut tentang kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi

yang dimaksud yaitu media yang digunakan. Pengertian secara luas menggunakan media selain media cetak. Dalam era globalisasi seperti saat ini, penggunaan internet sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Pergeseran kebiasaan secara perlahan dari penggunaan media cetak menjadi media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Sedangkan untuk pengertian pers secara sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. (Habsari 2017)

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salahsatu pilar demokrasi mempunyai peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif (Ahmad Jamaludin 2022). Namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masyarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong, yang lebih mengkhawatirkan adalah yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Lembaga pers dan Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan dan etika. Tak pelak lagi profesionalisme menjadi tuntutan utama disini. Jadi pelaku pers tidak hanya bertanggung jawab terhadap majikan dan pasar namun juga kepada Masyarakat (Supian Hadi, Fattahul Anjab, and Ratminto 2022).

Dalam konteks hukum Indonesia, proses penanganan perkara yang terkait dengan pers diatur secara khusus dalam UU Pers. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan pers memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penanganan tindak pidana umum. Perbedaan ini terutama terlihat dalam proses pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Penanganan kasus pers memerlukan pendekatan yang berbeda karena berkaitan erat dengan aspek kebebasan pers dan ekspresi. Oleh karena itu, penegak hukum di Indonesia perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang spesifisitas hukum yang berlaku dalam kasus pers. Mereka harus mampu membedakan antara kesalahan pemberitaan yang dilakukan secara tidak sengaja dengan tindakan sengaja menyebarkan berita bohong atau fitnah, yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Selain itu, penting juga untuk memahami siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus pidana di lingkungan pers. Dalam konteks UU Pers, tanggung jawab tidak hanya terletak pada individu yang menulis atau menyunting berita, tetapi juga pada lembaga pers dan pemimpin redaksinya. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pemberitaan adalah hasil kerja kolektif dan institusional, dan bukan hanya tanggung jawab individu. Dengan demikian, ketika terjadi kasus pemberitaan yang melanggar hukum, seperti penyebaran berita bohong atau fitnah, tidak hanya penulis berita yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga struktur editorial yang lebih luas. Ini menunjukkan pentingnya tata kelola dan pengawasan redaksional yang ketat di dalam organisasi pers untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga integritas jurnalistik. (M. 2013)

Pers yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat serta tanggung jawab yang sangat besar, bukan berarti pers bebas dari berbagai persoalan yang ada (Akbari n.d.). Berita-berita pers tidak mungkin menyenangkan semua pihak karena pasti ada saja terdapat beberapa pihak yang tidak senang atau tidak suka berita tersebut, wartawan pun tak luput dari kelemahan dan kesalahan dalam memperoleh dan menghimpun suatu berita (Rahantan 2020). Jika terjadinya kesalahan dalam memperoleh dan menghimpun suatu berita, perusahaan pers memberikan hak jawab apabila ada suatu pemberitaan yang salah, tidak tepat dan tidak akurat yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yang merasa dirugikan (Rasyid 2015).

Di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, media atau pers telah menegaskan peranannya sebagai salah satu instrumen penting dalam menyediakan, mendistribusikan, dan memfasilitasi aliran informasi serta berita kepada masyarakat luas. Media berperan sebagai jembatan antara berbagai peristiwa di dunia dan publik, membawa berita dari berbagai sudut dan aspek kehidupan. Dengan kemajuan teknologi, kemampuan media untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam telah meningkat secara signifikan, memungkinkan informasi dan berita untuk menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada sebelumnya. Dalam konteks ideal, pers yang objektif, transparan, dan tidak memihak berperan penting dalam memberikan pencerahan dan informasi yang akurat. Hal ini sangat penting dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu penting, baik lokal maupun global, dan pada gilirannya, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut.

Peran pers dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada penyampaian berita atau informasi, tetapi juga termasuk mendorong partisipasi publik dan demokrasi. Dengan menyajikan berbagai perspektif dan analisis mendalam, media dapat mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan terlibat secara aktif dalam diskusi publik. Dalam hal ini, pers yang berfungsi dengan baik dapat menjadi katalisator untuk perubahan sosial dan politik, mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Untuk mencapai ini, penting bagi media untuk mempertahankan standar etika yang tinggi, menghindari bias, dan tetap berkomitmen untuk menyajikan fakta dengan cara yang tidak menggiring opini. Dengan melakukan ini, media tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitasnya di mata public (Rasyid 2015)

Dalam dunia jurnalisme yang semakin didorong oleh kecepatan dan tekanan untuk menyampaikan informasi secara cepat, terdapat tantangan yang semakin meningkat dalam menjaga akurasi dan keandalan pemberitaan. Dinamika pemberitaan yang cepat ini sering kali membuat media terjebak dalam dilema antara kecepatan dan ketelitian. Akibatnya, kesalahan dalam pemberitaan, yang sayangnya tidak jarang terjadi, dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya berpotensi memberikan informasi yang menyesatkan kepada publik, tetapi juga bisa menciptakan gambaran yang salah atau bias tentang suatu peristiwa atau individu. Dampaknya tidak terbatas pada penyebaran informasi yang salah saja, tetapi juga mencakup kerugian reputasi yang serius bagi subjek berita, yang sering kali sulit untuk dipulihkan. Di samping itu, ada kerugian finansial yang mungkin ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat, serta dampak psikologis yang mendalam, yang dapat memengaruhi individu atau kelompok tertentu secara negatif.

Dalam meminimalkan kesalahan pemberitaan adalah melalui penerapan standar jurnalistik yang tinggi dan pelatihan berkelanjutan bagi wartawan dan editor. Penting bagi media untuk memahami bahwa setiap berita yang disiarkan memiliki potensi untuk memengaruhi opini publik dan kehidupan individu. Oleh karena itu, penting untuk mengecek dan memverifikasi informasi secara menyeluruh sebelum publikasi. Selain itu, media harus siap untuk bertanggung jawab dan melakukan koreksi atau klarifikasi segera ketika kesalahan terjadi. Dengan langkah-langkah ini, media dapat membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan dapat dipercaya. Hal ini sangat penting dalam membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap media, serta dalam memastikan bahwa media terus berperan sebagai pilar penting dalam masyarakat yang demokratis dan terinformasi. (Teguh 2021)

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi yang akurat, kasus-kasus kesalahan pemberitaan yang semakin sering terjadi telah membawa dampak yang luas dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendalam dan mendesak untuk lebih memahami batasan dan tanggung jawab pers. Dalam konteks ini, masyarakat menjadi semakin kritis terhadap sumber dan kualitas informasi yang mereka terima. Kesalahan dalam pemberitaan tidak hanya menciptakan kerugian secara langsung kepada individu atau kelompok yang menjadi subjek berita, tetapi

juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap media secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengeksplorasi dan mendefinisikan kembali peran serta tanggung jawab pers dalam menyajikan berita yang tidak hanya cepat dan relevan, tetapi juga akurat dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, pers harus memperhatikan etika jurnalistik dan standar profesionalisme yang tinggi, memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Pertanyaan mengenai bagaimana pihak yang dirugikan oleh kesalahan pemberitaan mendapatkan hak, keadilan, dan kompensasi yang sesuai menjadi semakin penting. Ini menekankan perlunya mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani keluhan serta klaim yang diajukan oleh mereka yang terkena dampak negatif dari pemberitaan. Mekanisme ini harus mampu menyeimbangkan kebebasan pers dengan hak individu untuk mendapatkan perlindungan dari informasi yang salah atau menyesatkan. Hal ini juga mencakup proses penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, dimana pihak yang dirugikan dapat mengajukan keluhan dan memperoleh keadilan yang layak. Penelitian dalam bidang ini sangat penting untuk mengembangkan kerangka kerja hukum dan etika yang lebih kuat, yang tidak hanya melindungi kebebasan pers, tetapi juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, pers dapat terus berfungsi sebagai pilar demokrasi yang kuat, sekaligus mempertahankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. (Mustawa n.d.)

Perilaku jurnalistik mencakup sikap, moral atau perbuatan serta tindakan wartawan saat melaksanakan kerjanya dalam kegiatan jurnalistik, ketika mencari informasi dengan narasumber atau subjek berita (Hardiyudanto 2011). Dengan kata lain, yang berpotensi melanggar Kode etik jurnalistik bukan hanya produk jurnalistik, bukan hanya pemberitaan, namun juga perilaku, sikap, atau tindakan wartawan ketika melaksanakan tugas jurnalistik (Rasyid 2015). Meskipun ada banyak literatur, diskusi, dan sumber informasi yang dengan luas membahas mengenai etika dalam jurnalisme serta tanggung jawab media, tampaknya masih ada kekurangan dalam penelitian yang secara khusus dan mendalam fokus pada tanggung jawab pers khususnya dalam menangani dan mengatasi kesalahan pemberitaan, khususnya dengan mempertimbangkan dampak hukum, etika, dan moral dari kesalahan tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru, mendalam, dan komprehensif mengenai tanggung jawab pers dalam konteks kesalahan pemberitaan. (Rifai 2010)

Semakin kompleks dan beragamnya informasi yang disampaikan oleh pers, serta dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang kredibel, pertanyaannya menjadi, bagaimanakah pers seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan dalam pemberitaannya? Apa saja mekanisme hukum, etika, dan norma yang bisa menjadi acuan bagi pers dalam menjalankan fungsinya, dan bagaimana pihak yang dirugikan dapat mendapatkan Pertanggung Jawaban

Penelitian ini merupakan sebuah upaya yang dirancang dengan tujuan utama yang saling terkait, dengan fokus pada peran dan tanggung jawab media massa dalam konteks kesalahan pemberitaan. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dengan cermat dan detail berbagai bentuk tanggung jawab yang diemban oleh pers dalam situasi di mana terjadi kesalahan dalam pemberitaan. Ini adalah langkah penting untuk memahami peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan bagaimana setiap kesalahan pemberitaan dapat memengaruhi pandangan publik terhadap media tersebut. Dalam upaya ini, akan dilakukan eksplorasi mendalam terkait dampak-dampak dari kesalahan pemberitaan ini.

Kemudian, tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menjelajahi implikasi hukum, etika, dan moral yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dari kesalahan-kesalahan pemberitaan yang terjadi. Ini melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana kesalahan dalam pemberitaan dapat melanggar prinsip-prinsip etika jurnalistik, menciptakan masalah hukum, dan menghadirkan dilema moral bagi wartawan dan redaksi. Kita akan membahas bagaimana pihak-pihak yang terlibat, termasuk media dan subjek pemberitaan, dapat

memengaruhi atau dipengaruhi oleh aspek-aspek hukum, etika, dan moral dalam konteks ini.

Selanjutnya, tujuan ketiga dari penelitian ini adalah untuk menyusun rekomendasi atau solusi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari riset ini. Solusi-solusi ini akan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan data yang kami kumpulkan selama penelitian. Kami bertujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas pemberitaan media, memastikan integritas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, dan merancang mekanisme pemulihan yang adil dan seimbang bagi pihak yang mungkin dirugikan oleh kesalahan pemberitaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki tujuan yang sangat penting dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dalam dunia pers, melainkan juga merupakan bagian integral dari upaya konstruktif yang bertujuan untuk mencari solusi-solusi yang dapat secara substansial meningkatkan standar pemberitaan yang ada. Penelitian ini diarahkan pada upaya menjaga integritas media, mengokohkan prinsip-prinsip keadilan, serta mengedepankan etika yang ketat dalam menyajikan informasi kepada publik.

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada pengungkapan dan pemahaman terhadap masalah yang mungkin timbul dalam praktik jurnalisme, tetapi juga aktif berperan dalam memberikan kontribusi positif untuk pembenahan dan perbaikan dalam industri pers. Dengan menekankan pentingnya solusi-solusi yang efektif, penelitian ini menjadi sebuah tonggak penting dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kualitas dan keandalan dalam pemberitaan, serta dalam mewujudkan tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat sebagai konsumen utama dari informasi yang disajikan oleh media.

Selain itu, melalui penelitian ini, diharapkan akan tercipta kerangka kerja yang lebih baik untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja media, sehingga dapat tercipta lingkungan pers yang lebih akuntabel dan berintegritas. Dengan cara ini, penelitian ini bukan hanya menjadi sebuah analisis kritis, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi perubahan positif dalam dunia pers, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pers memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai sumber informasi dan edukasi. Menurut (Quail 2010), pers memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi dengan akurat kepada masyarakat. Di era demokrasi, pers sering dijuluki sebagai "pengawal keempat", yang artinya memegang peranan kritis dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan keadilan sosial. Dengan posisi strategisnya ini, pers diharapkan bertindak dengan integritas dan objektivitas.

Selain kasus ini, ada pula kasus yang melibatkan pemimpin umum majalah berita Tempo dan atas kantor majalah Tempo. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan dilakukannya sita jaminan atas rumah tinggal Gunawan Muhamad sebagai respon atas pengaduan bos Grup Artha Graha, Tomy Winata sehubungan dengan pernyataan Gunawan yang menyatakan "... Jangan sampai Republik ini jatuh ke tangan preman." Pernyataan ini dianggap Tommy sebagai pencemaran nama baiknya. Sita jaminan atas kantor Tempo dilakukan untuk menindaklanjuti vonis terhadap Pemimpin Redaksi Tempo, Bambang Harimurti dan dua wartawan Tempo Ahmad Tengku dan Tengku Iskandar Ali yang diadukan Tommy atas tuduhan pemuatan berita bohong Majalah Tempo berjudul "Ada Tommy di Tenabang". Kasus kedua ini juga divonis Pasal 310 ayat (2) KUHP (Habsari 2017)

Dalam praktiknya, tidak jarang pers melakukan kesalahan pemberitaan. Kesalahan ini bisa berupa penyajian informasi yang tidak akurat, pelanggaran privasi, atau bahkan pemberitaan yang bersifat fitnah. mengungkapkan bahwa kesalahan pemberitaan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan dalam pengumpulan data, interpretasi yang salah, atau bahkan kesengajaan demi keuntungan tertentu. Kesalahan semacam ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu atau kelompok yang menjadi subjek pemberitaan tersebut.

Dalam konteks penyelesaian kasus kesalahan pemberitaan, beberapa negara telah mengambil langkah proaktif dengan menetapkan mekanisme khusus. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyeimbang antara kebebasan pers dan tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai penjaga integritas jurnalistik. Di sisi lain, kode etik jurnalistik berperan vital sebagai panduan dalam menentukan kesalahan dan memberikan sanksi yang sesuai. Kode etik ini menjadi landasan moral dan profesional yang mengatur cara kerja wartawan, memastikan bahwa setiap informasi yang disiarkan adalah akurat, adil, dan tidak bias. Kedisiplinan wartawan terhadap aspek-aspek seperti absensi, kehadiran dalam rapat, dan pematuhan terhadap aturan yang berlaku, semakin menegaskan komitmen mereka terhadap profesionalisme dan integritas jurnalistik.

Di Pekanbaru Pos, misalnya, wartawan berkomitmen untuk selalu menulis fakta yang ada, memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan merupakan kebenaran yang tidak direayasa. Wartawan di media ini menganggap tugas menulis tidak hanya sebagai pekerjaan tetapi juga sebagai sarana pendidikan. Mereka percaya bahwa melalui tulisan, mereka berperan dalam mendidik bangsa. Hal ini menunjukkan bagaimana Pekanbaru Pos menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab. Dengan menulis berita yang faktual dan sesuai dengan undang-undang pers serta kode etik jurnalistik, wartawan di Pekanbaru Pos membuktikan bahwa mereka bukan hanya pencipta berita, tetapi juga pendidik dan pembentuk opini publik yang bertanggung jawab. (Fretes and Kaligis 2018).

Peran pers dalam masyarakat modern yang demokratis memegang peranan penting dan tidak bisa diabaikan. Pers memiliki tugas utama dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, memeriksa dan menyeimbangkan kekuasaan, serta memelihara transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan publik. Kemampuan pers untuk menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif sangat bergantung pada kredibilitas dan integritasnya. Dalam hal ini, tanggung jawab pers tidak hanya terletak pada penyampaian berita yang objektif dan tidak bias, tetapi juga pada ketepatan dan kehati-hatian dalam melaporkan setiap informasi. Tanggung jawab ini menjadi semakin kritis di era di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui berbagai platform media.

Pada saat yang sama, penting untuk mengakui bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, pers juga harus senantiasa berfokus pada tanggung jawab terhadap kesalahan pemberitaan. Dalam konteks ini, pimpinan redaksi di media cetak maupun elektronik memegang peranan penting. Mereka bukan hanya bertanggung jawab atas arah editorial dan isi dari publikasi, tetapi juga atas setiap kesalahan yang terjadi dalam proses pemberitaan. Tanggung jawab ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas dan reputasi media, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak dan keadilan bagi individu atau kelompok yang berpotensi dirugikan oleh kesalahan pemberitaan tersebut tetap terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral dan etis menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari praktik jurnalisme yang baik, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap media. (Rasyid 2015).

Di era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar dengan kecepatan cahaya melalui berbagai platform media, kesalahan dalam pemberitaan bukan hanya kesalahan ringan, melainkan dapat memiliki konsekuensi serius yang merugikan banyak pihak. Dengan kemudahan akses terhadap informasi, kesalahan pemberitaan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat dengan cepat menyebar luas, berpotensi merusak reputasi, menghancurkan karir, dan bahkan mengganggu kehidupan pribadi individu yang terlibat. Lebih jauh lagi, kesalahan dalam pemberitaan dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan dalam masyarakat, memicu reaksi berantai yang dapat mengganggu keharmonisan sosial. Kesalahan informasi yang tersebar luas dapat menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman yang luas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Mengingat dampak yang luas dan mendalam ini, pers memiliki tanggung jawab moral dan etis yang sangat besar untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disiarkan adalah akurat, berimbang, dan tidak merugikan pihak yang terlibat. Tanggung jawab ini tidak hanya terkait dengan integritas jurnalistik, tetapi juga dengan kepercayaan publik terhadap media.

Pers harus melakukan pemeriksaan fakta yang ketat, menyajikan berbagai sisi dari suatu isu secara adil, dan siap untuk memperbaiki kesalahan secepat mungkin ketika terjadi. Dengan melakukan ini, pers tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyedia informasi yang dapat dipercaya, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang terinformasi dan bertanggung jawab (Supian Hadi, Fattahul Anjab, and Ratminto 2022)

Tanggung jawab pers dalam menghadapi kesalahan pemberitaan bukanlah hal yang ringan, dan melibatkan serangkaian langkah yang ketat dan terstruktur. Langkah pertama dan mungkin yang paling penting adalah verifikasi sumber informasi. Dalam era di mana informasi mudah didapatkan dan disebarluaskan, penting bagi pers untuk memastikan bahwa setiap sumber yang digunakan adalah kredibel dan dapat dipercaya. Ini berarti melakukan penelitian mendalam, tidak hanya mengandalkan sumber tunggal, tetapi juga mengecek dan menyeimbangkan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, pemeriksaan fakta yang cermat sebelum publikasi adalah langkah krusial untuk menghindari kesalahan pemberitaan. Proses ini harus dilakukan dengan ketelitian dan objektivitas, memastikan bahwa setiap klaim dan pernyataan yang dibuat dalam berita telah diverifikasi secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, tidak kalah pentingnya adalah kesiapan pers untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Tidak ada proses yang sempurna, dan kesalahan kadang terjadi meskipun telah dilakukan verifikasi dan pemeriksaan fakta. Dalam situasi ini, penting bagi pers untuk bertindak dengan transparansi dan bertanggung jawab. Ini berarti tidak hanya mengakui kesalahan secara terbuka tetapi juga melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti menerbitkan koreksi atau klarifikasi, dengan cara yang cepat dan jelas. Dengan demikian, pers tidak hanya memperbaiki informasi yang salah tetapi juga mempertahankan kepercayaan publik. Kesiapan untuk memperbaiki kesalahan menunjukkan komitmen pers terhadap kebenaran dan integritas, yang pada akhirnya memperkuat peran pers sebagai pilar penting dalam masyarakat demokratis. (Akbari n.d.)

Peran pers dalam masyarakat bukan hanya sebatas menyajikan berita atau informasi, tetapi juga melindungi dan memelihara kepercayaan publik. Ini berarti bahwa tanggung jawab pers terhadap kesalahan pemberitaan melampaui batas-batas internal media itu sendiri dan menjadi bagian dari komitmen yang lebih luas terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ketika pers melakukan kesalahan dalam pemberitaan, ini tidak hanya mencemarkan reputasi mereka sendiri tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap media secara umum. Oleh karena itu, pers harus beroperasi dengan standar integritas yang tinggi, memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan benar, adil, dan tidak bias. Tanggung jawab ini tidak hanya penting dalam menjaga integritas media, tetapi juga dalam memelihara kepercayaan publik terhadap institusi pers sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan.

Selanjutnya, tanggung jawab pers dalam mencegah dan mengatasi kesalahan pemberitaan merupakan refleksi dari komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan integritas dalam masyarakat demokratis. Media berperan sebagai penjaga yang memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik tidak hanya menghibur atau memberitakan, tetapi juga mendidik, memberi wawasan, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, pers memiliki tanggung jawab yang luas dan penting, tidak hanya memastikan keakuratan informasi yang disampaikan, tetapi juga membentuk bagaimana masyarakat memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Kesalahan pemberitaan, jika tidak ditangani dengan benar, dapat merusak fondasi ini, sehingga penting bagi pers untuk bertindak dengan tanggung jawab dan kehati-hatian dalam setiap aspek kerja mereka. (M. 2013)

METODE

Penelitian ini adalah studi kuantitatif yang komprehensif, yang bertujuan untuk menangkap data empiris dan mengukurnya dalam bentuk numerik. Jenis penelitian ini dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan hasil pengukuran yang dapat diandalkan dan

validitas yang dapat diuji melalui analisis statistik. Dengan menggunakan metodologi ini, kami berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan, serta untuk mengkuantifikasi seberapa sering dan seberapa parah kasus-kasus kerugian tersebut terjadi.

Pendekatan survei cross-sectional dipilih karena efisiensi dan efektivitasnya dalam mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Dengan menggunakan kuesioner online, kami bisa menjangkau responden dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis dengan lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Ini memungkinkan penelitian untuk merefleksikan keragaman dan dinamika masyarakat Indonesia yang luas, serta memastikan bahwa data yang diperoleh adalah representatif dari populasi yang diteliti.

Penelitian kami berfokus pada populasi target yang sangat luas, yaitu semua individu atau entitas hukum di Indonesia yang merasa telah mengalami kerugian akibat kesalahan pemberitaan oleh media pers dalam dua tahun terakhir. Fenomena ini bisa mencakup berbagai insiden di mana pemberitaan yang tidak akurat, bias, atau salah telah merugikan individu, bisnis, atau organisasi. Karena populasi ini sangat besar dan beragam, kami memutuskan untuk mengambil pendekatan yang cermat dalam merancang sampel penelitian kami.

Salah satu langkah penting yang kami ambil adalah menggunakan metode stratified random sampling. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk memecah populasi yang kompleks ini menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan jenis media yang digunakan dalam pemberitaan. Jenis media yang kami pertimbangkan termasuk media cetak, televisi, radio, dan platform online. Dengan mengidentifikasi strata berdasarkan kategori media ini, kami dapat memastikan bahwa setiap segmen dari populasi yang terpengaruh oleh kesalahan pemberitaan akan terwakili secara adil dalam sampel penelitian kami.

Setelah kami mengidentifikasi strata berdasarkan jenis media, langkah selanjutnya adalah mengambil sampel yang proporsional dari masing-masing strata tersebut. Hal ini penting karena kami ingin memastikan bahwa setiap kelompok yang terpengaruh oleh pemberitaan yang salah memiliki kesempatan yang sama untuk diwakili dalam temuan penelitian kami. Dengan mengikuti prosedur ini, kami berharap dapat menghasilkan data yang representatif dan akurat yang mencerminkan dampak kesalahan pemberitaan media pers di berbagai jenis media dalam masyarakat Indonesia.

Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman tentang dampak kesalahan pemberitaan media pers di Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan analisis yang teliti dan menyeluruh terhadap data yang kami kumpulkan dari berbagai strata media. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang peran media pers dalam masyarakat dan bagaimana kesalahan pemberitaan dapat memengaruhi individu dan entitas hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, diharapkan akan ada upaya yang lebih baik dalam meningkatkan etika dan akurasi dalam pemberitaan media pers di masa depan.

Data primer akan dikumpulkan dengan metode survei menggunakan kuesioner yang dirancang khusus untuk penelitian ini dan disebarluaskan melalui platform online. Kuesioner akan mencakup pertanyaan yang dirancang untuk menilai berbagai aspek dari tanggung jawab pers, termasuk namun tidak terbatas pada tingkat kerugian yang dirasakan oleh responden, respons yang mereka terima dari media, dan hasil dari tanggapan tersebut. Kami akan menggunakan skala Likert dalam sebagian besar pertanyaan untuk memperoleh penilaian yang gradasional dari responden tentang persepsi mereka terhadap pertanyaan yang diajukan.

Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner online telah melalui proses validasi untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah valid dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas dari kuesioner juga telah diuji untuk memastikan bahwa jika kuesioner tersebut diambil oleh orang yang sama di waktu yang berbeda, hasil yang diperoleh akan konsisten. Kuesioner akan dibagi menjadi beberapa

bagian: bagian pertama untuk mengumpulkan informasi demografis dari responden, dan bagian kedua yang terdiri dari sejumlah item yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab pers.

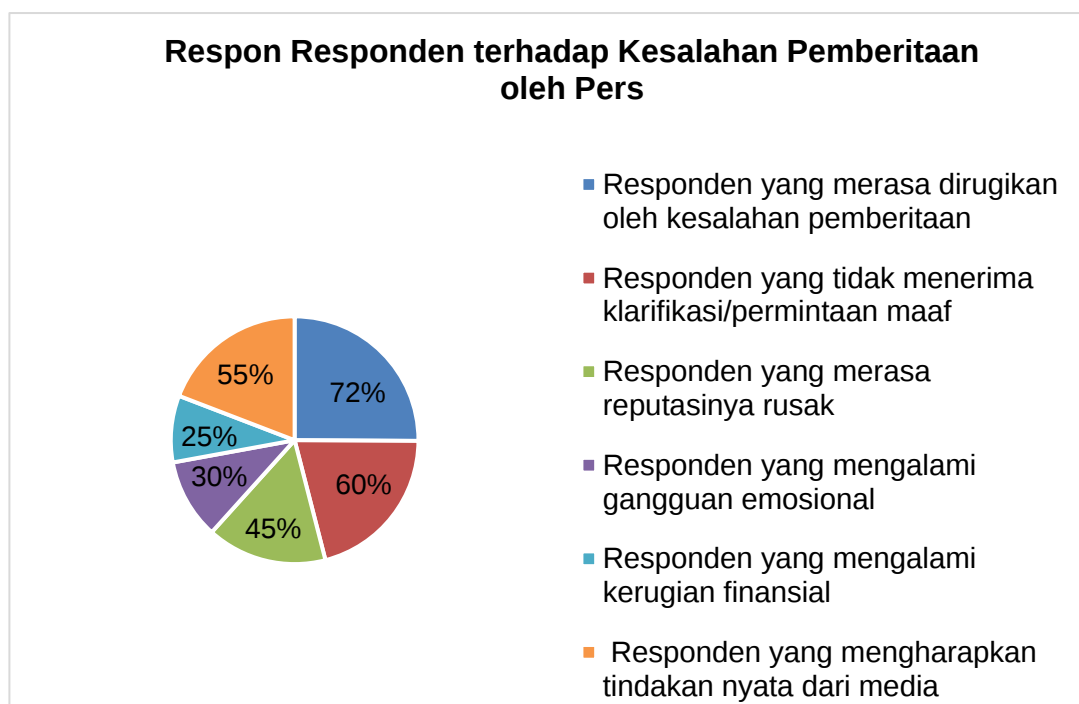
Data yang diperoleh dari survei akan diimpor ke dalam perangkat lunak statistik canggih untuk diolah lebih lanjut. Pertama, kami akan melakukan analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum mengenai data, termasuk tendensi sentral seperti mean dan median, serta ukuran penyebaran seperti rentang dan standar deviasi. Kemudian, untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, kami akan menerapkan teknik analisis inferensial yang sesuai dengan jenis data dan pertanyaan penelitian, seperti uji chi-square untuk mengevaluasi hubungan antar variabel kategoris atau t-test untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok.

Dalam setiap tahapan penelitian ini, kami akan sangat memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Semua responden akan diberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan diikuti, serta potensi manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari partisipasi mereka. Informed consent akan diperoleh dari setiap responden sebelum mereka berpartisipasi dalam survei, dan mereka akan dijamin bahwa identitas dan tanggapan mereka akan tetap anonim dan rahasia.

Kami mengakui bahwa terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Meskipun kami berusaha untuk mengurangi bias sebanyak mungkin, masih ada kemungkinan bahwa responden mungkin memberikan tanggapan yang tidak sepenuhnya akurat karena sensitivitas topik atau keinginan untuk menampilkan diri dengan cara tertentu. Selain itu, meskipun sampel telah dirancang untuk representatif, terdapat kemungkinan bahwa sampel yang diambil tidak sempurna mencerminkan populasi secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari kuesioner yang disebarluaskan kepada responden, terungkap beberapa temuan menarik mengenai tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemberitaan.



Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap tanggung jawab pers dan realitas yang ada di lapangan. Salah satu hal yang mencolok adalah bahwa lebih dari setengah dari responden merasa bahwa pers tidak cukup

bertanggung jawab atas kesalahan pemberitaannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai etika jurnalistik dan standar profesional yang dipegang oleh lembaga pers di Indonesia.

Kerugian reputasi menjadi kerugian yang paling sering dirasakan oleh responden. Ini menunjukkan betapa besarnya dampak dari kesalahan pemberitaan terhadap individu atau lembaga yang menjadi subjek berita. Dalam konteks ini, tanggung jawab pers tidak hanya sebatas memperbaiki informasi yang salah, tetapi juga memulihkan reputasi pihak yang dirugikan.

Keharusan bagi pers untuk segera melakukan klarifikasi dan permintaan maaf menjadi tuntutan yang paling kuat dari responden. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang klarifikasi dan permintaan maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban minimal yang harus dilakukan oleh pers ketika melakukan kesalahan.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan keakuratan dalam pemberitaan oleh lembaga pers. Temuan ini memperkuat argumen bahwa integritas pers merupakan fondasi utama dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, integritas tidak hanya mencakup akurasi faktual dalam pemberitaan, tetapi juga menggambarkan komitmen media untuk mematuhi prinsip-prinsip etika jurnanisme yang tinggi.

Selain itu, temuan ini juga memberikan penekanan yang kuat pada tanggung jawab moral dan profesional yang harus dipegang teguh oleh lembaga pers ketika terjadi kesalahan dalam pemberitaan. Tanggung jawab moral ini mencakup kewajiban pers untuk segera mengklarifikasi setiap kesalahan yang mungkin terjadi, mengoreksi informasi yang salah, dan menyajikan berita yang lebih akurat kepada publik. Dalam situasi di mana pihak yang dirugikan oleh kesalahan pemberitaan teridentifikasi, lembaga pers juga memiliki tanggung jawab etis untuk memberikan kompensasi yang sesuai, jika diperlukan.

Dengan kata lain, temuan ini tidak hanya menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip dasar seperti integritas dan akurasi dalam praktik jurnanisme, tetapi juga menunjukkan bahwa pers harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki kesalahan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap publik dan individu yang mungkin terdampak. Hal ini adalah upaya penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai sumber informasi yang andal dan terpercaya.

SIMPULAN

Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya aliran informasi di era digital saat ini, penelitian yang baru saja kami lakukan menawarkan wawasan yang cukup mendalam tentang bagaimana masyarakat merasa terpengaruh oleh kesalahan pemberitaan dari institusi pers. Lebih dari sekadar angka dan statistik, fakta bahwa sejumlah besar individu merasa dirugikan akibat informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan, menjadi suatu hal yang patut diperhatikan. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek material, namun meluas ke ranah yang lebih kompleks. Ini mencakup reputasi pribadi atau lembaga yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dibangun namun bisa rusak dalam sekejap, trauma emosional yang bukan hanya mempengaruhi kesejahteraan mental tetapi juga dapat berdampak pada kualitas hidup seseorang, serta dampak finansial yang bisa jadi mengubah tatanan ekonomi individu atau organisasi yang bersangkutan.

Menyusul temuan tersebut, hal yang lebih mengejutkan dan patut mendapat perhatian serius adalah bagaimana respons media terhadap keluhan masyarakat seringkali terasa lamban atau bahkan tidak ada sama sekali. Banyak individu merasa bahwa suara dan keprihatinan mereka tenggelam dalam kebisingan informasi, tanpa mendapatkan klarifikasi atau tindak lanjut yang memadai dari pihak media. Kesenjangan ini menyoroti adanya perbedaan antara ekspektasi masyarakat terhadap peran media sebagai penjaga kebenaran dan penerangan dalam era demokrasi dengan realitas yang mereka alami. Sebagai entitas yang dianggap kredibel dan memiliki peran sentral dalam menyebarkan informasi, media seharusnya mampu menjalankan fungsinya dengan integritas tinggi,

memastikan bahwa setiap berita yang disampaikan telah melalui proses verifikasi yang ketat, dan memiliki mekanisme responsif terhadap feedback masyarakat. Lebih dari itu, media harus menjadi sumber informasi yang mencerahkan, mengedukasi, dan memberdayakan masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan kerancuan atau bahkan kerugian.

Kerugian reputasi menjadi sorotan utama. Dalam era digital saat ini, reputasi dapat dengan mudah tercoreng hanya dalam hitungan detik. Oleh karena itu, kesalahan dalam pemberitaan bukan hanya soal ketidakakuratan informasi, tetapi juga dampak jangka panjang yang mungkin sulit dipulihkan. Apabila lembaga pers benar-benar berkomitmen terhadap integritas dan kebenaran, mereka harus memprioritaskan pemulihan reputasi pihak yang dirugikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika.

Masyarakat jelas menuntut tindakan nyata dari pers. Klarifikasi dan permintaan maaf menjadi hal dasar yang diharapkan, namun seringkali diabaikan. Ini menggambarkan perlunya peningkatan kesadaran di kalangan jurnalis dan lembaga media tentang pentingnya tanggung jawab sosial mereka.

Mengatasi kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realitas pemberitaan memerlukan langkah-langkah konkret dari lembaga pers. Untuk memulainya, meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan proses jurnalistik adalah esensial. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah berita dikumpulkan, diverifikasi, dan disajikan kepada publik. Dengan demikian, akan tercipta kepercayaan yang lebih kuat antara publik dan media. Lebih lanjut, transparansi ini juga memastikan bahwa berita yang disajikan telah melalui proses yang ketat dan objektif, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau bias.

Pelatihan etika jurnalistik juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Dalam dunia jurnalistik yang dinamis, dimana batasan antara fakta dan opini seringkali kabur, penting bagi para jurnalis untuk selalu mengingat kode etik mereka dan berkomitmen pada kebenaran. Pelatihan yang rutin dan berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan kompetensi jurnalis, tetapi juga membangun kesadaran mereka tentang tanggung jawab moral dan profesional mereka dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

Tak kalah pentingnya adalah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat. Mekanisme ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga masyarakat merasa didengar dan keluhan mereka ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif. Ini akan membangun hubungan simbiosis antara masyarakat dan media, di mana keduanya saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, pembentukan lembaga pengawas media yang benar-benar independen bisa menjadi langkah proaktif dalam menjaga integritas media. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan media, serta mengawasi standar profesional dan etika yang diterapkan oleh lembaga pers. Dalam era informasi yang serba cepat, di mana berita bisa dengan mudah disebarluaskan dalam hitungan detik, keberadaan lembaga semacam ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebar oleh media adalah informasi yang akurat, seimbang, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamaludin. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia." *Jurnal Forum Studi Hukum Dan Kemasyarakatan* Volume 4(1): 4.
- Akbari, Nur Aida. "Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Di Koran (Tinjauan Yuridis Normatif Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)."
- Fretes, Madrid D E, And Retor A W Kaligis. 2018. "Pemberitaan Tvri Pusat." *Cover Age: Journal Of Strategic Communication* 9(1).
- Habsari, Hanugrah Titi. 2017. "Pidana." (2): 287–308.
- M., Erbay Tredya Pratama C. 2013. "Tanggung Jawab Keperdataan Media Cetak Terhadap Kesalahan Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Seseorang Atau Kelompok Di Masyarakat."
- Mustawa. "Tanggung Jawab Hukum Kesalahan Berita Dalam Perspektif Kuhp, Uu Pers, Uu

- lte.” : 1–18.
- Quail, Mc. 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*.
<http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf>.
- Rifai, Eddy. 2010. *Tindak Pidana Pers*.
- Supian Hadi, Fattahul Anjab, And Ratminto Ratminto. 2022. “Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 5(9): 657–67.
- Teguh, Pri Pambudi. 2021. “Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Hukum Terkait Pemberitaan Pers Di Indonesia.” 42(1): 40.
file:///C:/Users/HP/Downloads/1164-2816-6-PB.pdf.